

**ANALISIS EFISIENSI PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH KOTA PADANG  
TAHUN 2009 – 2011**

**TUGAS AKHIR**

***Diajukan kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Akuntansi (DIII)  
sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Ahli Madya***



**Oleh  
ROBBY FEBRIANSYAH  
NIM. 15313**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
PROGRAM DIPLOMA III FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2013**

**PERSETUJUAN TUGAS AKHIR**

**ANALISIS EFISIENSI PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH KOTA PADANG  
TAHUN 2009 – 2011**

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Nama          | : Robby Febriansyah |
| NIM           | : 15313             |
| Program Studi | : Akuntansi (DIII)  |
| Fakultas      | : Ekonomi           |

Diketahui Oleh  
Ketua Prodi

Perengki Susanto, SE, M.Sc  
NIP. 19810404 200501 1 002

Padang, 25 Januari 2013  
Disetujui Oleh  
Pembimbing



Deviani, SE, M.Si, Ak  
NIP. 19690610 199802 2 001

## **PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

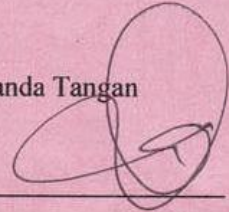
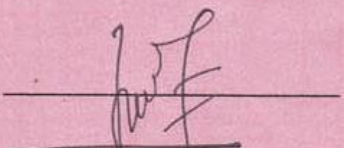
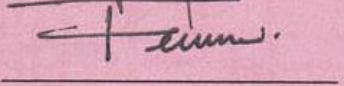
### **ANALISIS EFISIENSI PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2009 – 2011**

**Nama** : Robby Febriansyah  
**NIM** : 15313  
**Program Studi** : Akuntansi (DIII)  
**Fakultas** : Ekonomi

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir Prodi Akuntansi  
(DIII) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Padang, 25 Januari 2013

Tim Penguji,

|         | Nama                           | Tanda Tangan                                                                          |
|---------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Ketua   | Deviani, SE, M.Si, Ak          |  |
| Anggota | Lili Anita, SE, M.Si, Ak       |   |
| Anggota | Fefri Indra Arza, SE, M.Si, Ak |   |



## ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk meneliti efisiensi pemungutan pajak daerah Kota Padang dengan memperbandingkan antara biaya pemungutan pajak daerah dengan realisasi pajak daerah. Penelitian dilakukan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang yang menurut peraturan dan undang-undang mempunyai fungsi dalam mengelola pajak daerah dengan tahun penelitian mulai tahun 2009 – 2011.

Penelitian ini dilakukan dalam bentuk observasi. Penulis mengumpulkan data langsung dari Dinas terkait yang menurut peraturan dan undang-undang diperbolehkan dalam memungut pajak daerah. Berdasarkan data yang diperoleh tersebut, peneliti melakukan pengolahan data sehingga diperoleh hasil. Berdasarkan hasil tersebut peneliti dapat memberikan kesimpulan tentang efisiensi pemungutan pajak daerah Kota Padang.

Berdasarkan hasil perhitungan efisiensi pemungutan pajak daerah, menunjukkan bahwa rata-rata tingkat efisiensi pemungutan pajak daerah selama tiga tahun terakhir 2009 – 2011 adalah sebesar 6,50%.



## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur ucapkan ke Hadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Penyayang, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian yang diberi judul “Analisis Efisiensi Pemungutan Pajak Daerah Kota Padang Tahun 2009 – 2011”.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penelitian ini. dukungan serta perhatian yang telah diberikan memberikan semangat tersendiri untuk menyelesaikan penelitian ini. Ucapan terima kasih ini penulis aturkan kepada:

1. Ibuk Deviani, SE, M.Si, Ak selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu disela kesibukan, serta telah sabar memberikan bimbingan, arahan, serta dukungan kepada penulis selama proses penelitian ini.
2. Segenap Dosen – dosen, Staf, dan Karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang atas bantuan dan kemurahan hatinya, dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
3. Kepala Bidang Penagihan DPKA Kota Padang, terima kasih atas bantuan dan kerjasama dalam penyediaan informasi dan data guna penyusunan penelitian ini.
4. Ibunda tercinta atas semua doa tulus, semangat dan segala kasih sayang serta Ayahanda yang saya sayangi, yang selalu memberikan motivasi kepada penulis untuk selalu menjadi lebih baik.

5. Sahabat-sahabat seperjuangan Akuntansi DIII 2009 terima kasih atas bantuan, kenangan dan kebersamaannya selama Tiga tahun ini.
6. Kepada pihak-pihak lain yang tidak mungkin disebutkan satu per satu, yang telah memberikan dorongan, motivasi dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung atas kelancaran penyusunan Tugas Akhir ini.

Padang, Januari 2013

Penulis



## DAFTAR ISI

### Halaman

|                                                  |            |
|--------------------------------------------------|------------|
| <b>ABSTRAK</b>                                   | <b>i</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR</b>                            | <b>ii</b>  |
| <b>DAFTAR ISI</b>                                | <b>iv</b>  |
| <b>DAFTAR TABEL</b>                              | <b>vi</b>  |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN</b>                           | <b>vii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                         |            |
| A. Latar Belakang                                | 1          |
| B. Perumusan Masalah                             | 6          |
| C. Tujuan Penelitian                             | 6          |
| D. Manfaat Penelitian                            | 6          |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>                   |            |
| A. Pajak Daerah                                  | 8          |
| B. Biaya Pemungutan Pajak Daerah                 | 18         |
| C. Efisiensi Pemungutan Pajak Daerah             | 19         |
| D. Pertumbuhan Efisiensi Pemungutan Pajak Daerah | 20         |

### **BAB III PENDEKATAN PENELITIAN**

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| A. Bentuk Penelitian .....           | 21 |
| B. Lokasi dan Waktu Penelitian ..... | 21 |
| C. Rancangan Penelitian .....        | 21 |

### **BAB IV PEMBAHASAN**

|                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| A. Profil Instansi .....                                           | 25 |
| B. Pembahasan .....                                                | 34 |
| 1. Biaya Pemungutan Pajak Daerah Kota Padang .....                 | 34 |
| 2. Efisiensi Pemungutan Pajak Daerah Kota Padang .....             | 36 |
| 3. Pertumbuhan Efisiensi Pemungutan Pajak Daerah Kota Padang ..... | 37 |

### **BAB V PENUTUP**

|                     |    |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan ..... | 39 |
| B. Saran .....      | 39 |

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b> ..... | 40 |
|-----------------------------|----|

### **LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

### Halaman

|                                                                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Tabel 1.1, Realisasi Pajak Daerah Kota Padang Tahun 2009-2011 .....                                        | 5  |
| 2. Tabel 1.2, Biaya Pemungutan Pajak Daerah Kota Padang<br>Tahun 2009 – 2011 .....                            | 5  |
| 3. Tabel 1.3, Biaya Operasional Langsung Pemungutan Pajak Daerah<br>Kota Padang Tahun 2009 – 2011 .....       | 35 |
| 4. Tabel 1.4, Biaya Operasional Tidak Langsung Pemungutan Pajak Daerah<br>Kota Padang Tahun 2009 – 2011 ..... | 36 |
| 5. Tabel 1.6, Efisiensi Pemungutan Pajak Daerah<br>Kota Padang Tahun 2009 – 2011 .....                        | 38 |
| 6. Tabel 1.7, Pertumbuhan Efisiensi Pajak Daerah Kota Padang .....                                            | 40 |

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Data Perkembangan PAD Kota Padang Tahun 2009 – 2011
2. Data Biaya Pemungutan Pajak Daerah Kota Padang Tahun 2009 – 2011



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab dengan menitikberatkan otonomi daerah diletakan pada daerah kabupaten/kota, sehingga ruang lingkup otonomi daerah itu bersifat kondisional, artinya tergantung pada tempat dan waktu dimana otonomi itu diterapkan, maka perlu sumber-sumber pendapatan hasil daerah agar pemerintah dapat menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dengan kemampuan daerahnya sendiri, namun tidak semua sumber-sumber dapat dibagikan daerahnya.

Salah satu aspek penunjang dalam keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan nasional selain dari aspek sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya lainnya adalah ketersediaan dana pembangunan baik yang diperoleh dari sumber-sumber pajak maupun non pajak. Penghasilan dari sumber pajak meliputi berbagai sektor perpajakan. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atas undang-undang serta aturan pelaksanaannya. Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya) dari sektor swasta (wajib pajak membayar pajak) ke sektor negara (pemungut pajak/administrator pajak). Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik

rutin maupun pembangunan.. Tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan (kontraprestasi) individual oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak.

Salah satu wujud dari perhatian pemerintah dalam hal pajak ini adalah dengan diberlakukannya Otonomi Daerah (Otda) pada tahun 2001, yang berlaku efektif mulai Januari 2002. Dalam Otda ini, daerah diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan RI.

Pajak Daerah yang merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah Sendiri merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang dapat dipaksakan dan digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Pentingnya pajak sebagai fondasi kekuatan ekonomi dan kinerja system pemerintahan Negara bahwa di beberapa Negara berkembang pajak menempati posisi terpenting sebagai stabilisator kekuatan ekonomi dan kinerja sistem pemerintahan. Uang pajak digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga Negara mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Dengan demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu Negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalanya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan.



Untuk mengumpulkan uang dari sektor pajak tersebut bukan suatu pekerjaan yang mudah, sehingga diperlukan suatu kesadaran yang tinggi baik oleh masyarakat wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan didukung oleh aparat perpajakan yang tangguh serta sistem administrasi perpajakan yang memadai disamping juga adanya piranti hukum yang memberikan rasa keadilan serta kepastian hukum.

Kewajiban untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu atau membayar pajak kepada Negara merupakan suatu kewajiban bagi warga Negara, mengingat Negara mempunyai kekuasaan untuk memaksa warga negara agar membayar pajak atas dasar Undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Problematika yang terjadi di lingkungan masyarakat saat ini ialah kurangnya kesadaran warga Negara akan kewajiban pembayaran pajak, bahkan bagi sebagian orang pemungutan pajak dirasa sebagai suatu pemaksaan bagi warga negara.

Dalam pemugutan pajak diperlukan mekanisme yang tepat baik dari aparat yang melakukan pengawasan, pemugutan pajak maupun kendala-kendala yang dihadapi dalam mekanisme pengawasan pemungutan pajak, masih banyak kendala yang dihadapi para aparat pengawas pemungutan pajak dalam usaha intensifikasi pemungutan pajak menjadi suatu hal yang melemahkan pemungutan pajak daerah.

Dalam pemungutan pajak harus dilakukan sesuai dengan syarat-syarat pemungutan pajak yang telah ditetapkan, mengingat membebankan pajak kepada

masyarakat bukanlah suatu hal yang mudah. Pemungutan pajak harus dilaksanakan secara adil yang berarti bahwa pemungutan pajak harus dilakukan dengan mengatur hak dan kewajiban para wajib pajak, pajak diberlakukan bagi setiap warga Negara yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak, serta adanya sanksi atas pelanggaran pajak diberlakukan secara umum sesuai dengan berat ringanya pelanggaran. Selain syarat keadilan dalam pemugutan pajak, pemugutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian, pemugutan pajak harus efisien dan sistem pemugutan pajak harus dilakukan dengan sederhana. Jika pemugutan pajak dilakukan tanpa mengabaikan syarat-syarat pemungutan tersebut diatas maka dapat terjadi kemungkinan adanya berbagai hambatan dalam pemungutan pajak di Indonesia.

**Tabel 1.1**  
**Realisasi Pajak Daerah Kota Padang**  
**Tahun 2009 – 2011**

| No                         | Jenis Pajak Daerah        | Tahun Anggaran        |                       |                        |
|----------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
|                            |                           | 2009                  | 2010                  | 2011                   |
| 1                          | Pajak Hotel               | 6,948,371,260         | 6,106,355,228         | 7,910,983,109          |
| 2                          | Pajak Restoran            | 7,596,772,297         | 6,922,766,148         | 10,574,382,364         |
| 3                          | Pajak Hiburan             | 619,875,293           | 718,116,425           | 1,167,551,077          |
| 4                          | Pajak Reklame             | 3,423,898,310         | 3,020,545,000         | 3,597,016,400          |
| 5                          | Pajak Penerangan Jalan    | 30,588,560,470        | 38,577,494,675        | 42,281,804,495         |
| 6                          | Pajak Bahan Galian Gol. C | 18,405,971,848        | 22,235,542,880        | 21,495,483,620         |
| 7                          | Pajak Parkir              | 102,654,680           | 58,420,200            | 125,707,688            |
| 8                          | Pajak Air Tanah           | -                     | -                     | 205,419,439            |
| 9                          | BPHTB                     | -                     | -                     | 14,748,363,377         |
| 10                         | Pajak Sarang Burung Walet | -                     | -                     | -                      |
| 11                         | PBB                       | -                     | -                     | -                      |
| <b>Jumlah Pajak Daerah</b> |                           | <b>71,666,752,249</b> | <b>77,639,340,556</b> | <b>102,412,116,200</b> |

Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang, 2012

**Tabel 1.2**  
**Biaya Pemungutan Pajak Daerah Kota Padang Tahun 2009 – 2011**

| No            | Tahun | B.Operasi Lgsg     | B.Operasi Tdk Lgsg    | Total                 |
|---------------|-------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1             | 2009  | 151,680,000        | 4,597,901,612         | 4,749,581,612         |
| 2             | 2010  | 189.380.000        | 4,989,531,028         | 5,178,911,028         |
| 3             | 2011  | 189.526.500        | 6,155,053,810         | 6,344,580,310         |
| <b>Jumlah</b> |       | <b>530,586,500</b> | <b>15,742,486,450</b> | <b>16,273,072,950</b> |

Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang, 2012

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa perkembangan realisasi Pajak Daerah Kota Padang dari tahun 2009 sampai 2011 mengalami kenaikan serta melihat

dari biaya yang dikeluarkan dalam hal pemungutan pajak daerah yang juga mengalami fluktuasi setiap tahun. Berawal dari keadaan tersebut, maka akan diadakan suatu penelitian untuk mengukur efisiensi pemungutan Pajak Daerah Kota Padang, dengan melakukan pengkajian secara teoritis tentang efisiensi pemungutan pajak daerah sehingga diharapkan pemungutan pajak daerah agar lebih efisien.

Untuk itu peneliti mengangkat judul “Analisis Efisiensi Pemungutan Pajak Daerah Kota Padang Tahun 2009 – 2011”.

## **B. Perumusan Masalah**

Adapun perumusan masalah yaitu seberapa besar efisiensi pemungutan Pajak Daerah Kota Padang tahun 2009 – 2011?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penulis ialah untuk mengetahui seberapa besar efisiensi pemungutan Pajak Daerah Kota Padang tahun 2009 – 2011?

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Bagi Peneliti**

Penelitian ini merupakan sarana berlatih untuk memperluas wawasan dan meningkatkan keterampilan dalam melakukan penelitian serta mendalami teori yang berkaitan dengan efisiensi pemungutan Pajak Daerah di Kota Padang.

## 2. Bagi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang khususnya gambaran mengenai efisiensi pemungutan Pajak Daerah di Kota Padang.